

Peran Pemerintah, Sektor Swasta Dan Modal Sosial Terhadap Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Masyarakat di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur

Maria Bernadetha Ringa¹, Nyoman Djinar Setiawina², Made Heny Urmila Dewi³
A.A.I.N. Marhaeni⁴

(Book Antiqua 11, Bold, spasi 1)

^{1,2,3,4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana, Bali – Indonesia

Email: Mariabernadetha06179@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to find out (1) Influence of the role, of the government, the role of the private sector and social capital on community participation in the city of Kupang. (2) Influence of the role, of government, private sector and social capital and community participation in sustainable tourism development in the city of Kupang. (3) The role of community participation, in meditating on the role of government variables, the role of the private sector, social capital, on sustainable tourism development. (4) To design the right strategy in the development of sustainable tourism in the city of Kupang. This research was carried out in the city of Kupang, East Nusa Tenggara Province, in six subdistricts which have tourism, marine tourism, religious tourism, and artificial tourism. The sample in this study was 270 respondents. Data collected by questionnaires were then analyzed using SEM-PLS, and to strengthen tourism strategies in Kupang city, SWOT analysis was used. The results of the research and data analysis show that : (1) The role of government, the role of the private sector, and social capital directly have a positive and significant effect on public participation. (2) The role of the private sector does not have a significant effect on sustainable tourism development. (3) Community participation was able to play a part in mediating partially the role of the government, the role of the private sector and social capital towards sustainable tourism development in the city of Kupang in East Nusa Tenggara.

Key Words: The role of government, the role of the private sector, social capital, community participation, sustainable tourism development.

I. PENDAHULUAN

Selama lebih dari 60 Tahun pariwisata telah mengalami ekspansi dan difersifikasi menjadi salah satu sektor usaha yang berkembang sangat pesat. Salah satu provinsi yang menjadi perhatian pemerintah pusat dalam pengembangan pariwisata adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Provinsi NTT merupakan salah satu provinsi kepulauan di Indonesia yang wilayahnya disatukan oleh Laut Sawu dan Selat Sumba, dengan jumlah pulau 1.192 (pulau besar dan kecil), yang memiliki kekayaan alam dan kekayaan budaya yang cukup potensial untuk dikembangkan menjadi destinasi pariwisata yang potensial yang tersebar hampir di semua pulau di NTT. Langkah konkrit yang dilakukan pemerintah adalah pembangunan sarana dan prasarana berupa infrastruktur yang memadai serta sentral industri di destinasi pariwisata. Keterlibatan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pengolahan pariwisata menjadi faktor penting, karena masyarakatlah yang memahami dan menguasai wilayahnya (Elfianita,

2011). Partisipasi masyarakat merupakan suatu keharusan dalam setiap pembangunan berkelanjutan seperti yang dikemukakan oleh Gunn (1999), yang menegaskan bahwa “ *Local people participation is prerequisite for sustainable tourism*”.

Menurut Pitana (2004), pemberdayaan sesungguhnya merupakan usaha atau proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat lokal, sehingga mereka mampu mengidentifikasi permasalahan yang ada di daerahnya, menemukan potensi yang ada, menganalisis berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, untuk selanjutnya mampu merencanakan berbagai program di daerahnya. Kunjungan wisatawan ke Kota Kupang mengalami peningkatan dari Tahun 2014-2018, kecuali Tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan turun menjadi 9,042, yang diakibatkan kurangnya promosi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Kupang, serta wisatawan lebih berminat mengunjungi Kota-Kota lain di NTT seperti Labuan Bajo, Ende, Pulau Sumba, dan Alor lebih tinggi dibandingkan mengunjungi destinasi wisata di Kota Kupang (Jelamu, 2018). Pada akhir

Tahun 2018, jumlah kunjungan wisatawan meningkat menjadi 30,657 yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat lokal disekitar destinasi wisata dan penyerapan tenaga kerja di bidang usaha-usaha pariwisata. Pada ahir Tahun 2018, jumlah kunjungan wisatawan meningkat menjadi 30,657 yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat lokal disekitar destinasi wisata dan penyerapan tenaga kerja di bidang usaha-usaha pariwisata.

Masyarakat diperdayakan dengan memanfaatkan pengetahuan dan kearifan lokal agar menjadi subyek dalam pembangunan, mandiri, mampu menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan semangat kepercayaan diri masyarakat setempat (Kurniawati, 2007). Kerjasama antara pemerintah, dan swasta sangat berpengaruh dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berbasis masyarakat. Pariwisata berbasis masyarakat atau *Community Based Tourism* (CBT) harus bersinggungan dengan tiga pilar yaitu: Pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Partisipasi masyarakat merupakan komponen terpenting dalam upaya pertumbuhan kemandirian dan proses pemberdayaan (Nasikum, 1997). Pemerintah harus melibatkan pihak swasta dalam implementasi kebijakan, kontribusi tenaga ahli, tenaga trampil, maupun sumbangan dana, alat dan teknologi, sedangkan masyarakat dilibatkan dalam bentuk partisipasi non mobilisasi untuk memperoleh hasil pembangunan yang diinginkan (Sugiarti dan Argy, 2009). Kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan swasta, akan menunjang keberhasilan pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berbasis masyarakat di Kota Kupang NTT (Bandaso, 2018).

Tingkat kemiskinan di Kota Kupang cenderung menurun pada Tahun 2014-2018. Beberapa masalah yang mendasar yang menyebabkan pengangguran di Kota Kupang adalah terbatasnya lapangan pekerjaan, dan rendahnya tingkat pendidikan (BPS Kota Kupang, 2018). Langkah konkrit yang dilakukan adalah pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berbasis masyarakat, dan memanfaatkan berbagai destinasi pariwisata yang belum dikelola, agar dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat disekitar destinasi wisata (Maromon, 2017). Dengan kemitraan antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dalam pembangunan maupun pengolahan destinasi wisata, dapat menekan tingkat pengangguran di Kota Kupang, karena pembangunan sektor pariwisata dapat menyerap tenaga kerja bagi masyarakat (Kleden, 2018). Peran sektor swasta tidak maksimal tanpa ditunjang

dengan suatu langkah strategis yang dilakukan oleh pengelola suatu daya tarik wisata, ataupun pihak yang memiliki otoritas pengembangan pariwisata (Zulkifly, 2013).

Pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kota Kupang, harus mengedepankan modal sosial yang berada dalam masyarakat, agar pembangunan pariwisata tidak merubah dan menggeser budaya maupun norma yang berlaku dalam masyarakat, yaitu dengan memperhatikan unsur-unsur dalam modal sosial, berupa jaringan, kepercayaan, norma-norma (Mawarni, 2007). Modal sosial sangat penting dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, karena dengan modal sosial, masyarakat dapat mempertahankan norma-norma serta adat istiadat yang berlaku di daerahnya, sehingga pembangunan pariwisata dapat berkelanjutan, dan dapat mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi yang akan datang.

Pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berbasis masyarakat, harus mempertahankan norma, budaya dan adat istiadat di suatu daerah. Modal sosial berupa budaya serta adat istiadat dapat dikemas menjadi daya tarik wisata yang unik, yang merupakan daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Kupang (Maramon, 2017). Berdasarkan hasil penelitian dan *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilakukan oleh peneliti, hubungan antara antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta di destinasi wisata, saat ini belum sepenuhnya terwujud, karena belum terdapat sinkronisasi program kerjasama dalam pengembangan pariwisata (Timex, 2018). Hubungan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta merupakan modal yang kuat dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kota Kupang. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan, sering terhambat karena beberapa faktor yang meliputi (1) faktor alam, (2) faktor budaya dan (3) faktor akses pembangunan yang rendah (Suwinda, et al., 2012., Suardana & Dewi, 2015). Strategi yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis SWOT. Pengembangan pariwisata ke Kota Kupang, membutuhkan penanganan dan pengelolaan *atraksi, fasilitas, aksesibilitas, infrastruktur* dan *hospitalitas* yang baik (Wardana 2017). Strategi pengembangan akan menjadi rekomendasi awal terhadap arah pengembangan kepariwisataan dimasa yang akan datang. Dengan konsep pengembangan dan strategi yang tepat, manfaat kegiatan pariwisata semakin dirasakan oleh masyarakat dan daerah (Sudiarkajaya, 2018).

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kuantitatif. Wawancara dilaksanakan dengan metode diskusi terarah, dimana dengan metode ini informasi atau data yang didapatkan bisa diperoleh dengan waktu yang lebih singkat. Lokasi penelitian berada di wilayah Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang secara administratif terdiri dari 6 kecamatan yaitu Kecamatan Alak, Kecamatan Maulafa, Kecamatan Oebobo, Kecamatan Kota Raja, Kecamatan Kelapa Lima, dan Kecamatan Kota Lama, serta terdiri dari 51 (lima puluh satu) kelurahan. Populasi dalam penelitian ini adalah 378,425 kepala keluarga yang berada pada enam kecamatan di Kota Kupang NTT. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Stratified Random Sampling* karena anggota populasi yang digunakan tidak homogen yang diambil berdasarkan tingkat umur, pekerjaan dan tingkat pendidikan. Ukuran sampel dengan menggunakan tabel penentuan jumlah sampel pada taraf kesalahan 1%, 5% dan 10% yang dikembangkan dari Isaac dan Michel (Sugiyono : 2002) tentang penentuan jumlah populasi (N) = 378,435 dengan taraf kesalahan 10 persen diperoleh 269.97 atau sama dengan 270 responden Metode dalam pengumpulan data adalah dengan menggunakan teknik aksidental (*Accidental Sampling*) (Margom, 2004).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dipergunakan untuk menjawab permasalahan dengan menggunakan analisis *Partial Least Square* (PLS). PLS sebagai alternatif Pemodelan Persamaan Struktural yang dasar teorinya lemah, bisa digunakan sebagai konfirmasi teori (Wold, 1966). PLS merupakan metode yang menggunakan model SEM (*Structural Equation Modelling*) yang digunakan untuk mengatasi permasalahan hubungan diantara variabel yang kompleks namun ukuran sampel datanya kecil. Metode SEM memiliki ukuran sampel data minimal 100 (Hair *et al.*, 2010).

HIPOTESIS

Berdasarkan kerangka konsep maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- 1) Peran pemerintah, peran sektor swasta dan modal sosial berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur.
- 2) Peran pemerintah, peran sektor swasta, modal sosial dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pembangunan pariwisata

berkelanjutan di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur.

- 3) Partisipasi masyarakat memediasi peran pemerintah, peran swasta, dan modal sosial terhadap pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik responden berdasarkan umur, yaitu sebagian besar responden memiliki tingkat umur antara 40-49 tahun yaitu sebesar 29,63% dan paling sedikit responden adalah yang berumur kurang dari 20 tahun yaitu sebanyak 3,33% dan responden yang berumur diatas 60 tahun, yaitu 3.33%. Sebagian besar responden berpendidikan Sekolah Menengah Umum (SMU) atau sederajat yaitu sebanyak 50 persen. Responden yang berlatar belakang pendidikan Pascasarjana, adalah yang paling sedikit, yaitu hanya sebesar 1.11 persen. Responden terbanyak adalah yang berprofesi sebagai pedagang yaitu sebanyak 35 pesen. Banyak responden berprofesi sebagai pedagang karena, sebagian besar masyarakat lokal disekitar destinasi wisata, memanfaatkan obyek wisata untuk meningkatkan pendapatan, dengan memasarkan produk yang akan dijual kepada wisatawan. Responden juga banyak yang berprofesi sebagai nelayan yaitu sebesar 10.41 persen. Berprofesi sebagai nelayan adalah responden yang berada di sekitar destinasi wisata bahari, dimana para responden memanfaatkan destinasi wisata untuk digunakan wisatawan, seperti mancing, dan *snocling*, *surfing* serta wisata bahari lainnya. Responden terkecil adalah yang berasal dari PHRI, TNI, ASITA, dan usaha cafe, yaitu 0,37 persen.

Pengujian Model Struktural (*inner model*)

Inner model menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan pada *substantive theory*. Dalam menilai model dengan PLS, dimulai dengan melihat *R-squares* untuk setiap variabel *laten dependen*. Hasil pengujian *inner model* dapat melihat hubungan antar konstruk dengan dengan cara membandingkan nilai signifikansi dan *R-square* dari model penelitian (Ghozali, 2008:42).

Tabel 1.
Nilai *R-Squares*

Variabel. Endogen	R Square
Partisipasi masyarakat	0,467
Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan	0,469

Sumber: Data diolah, 2019.

Nilai *R-square* variabel partisipasi masyarakat sebesar 0,467 pada Tabel 1 menunjukkan bahwa 46,7 persen variabel partisipasi masyarakat dijelaskan oleh variabel peran pemerintah, peran swasta, dan modal sosial, sedangkan 53,3% dijelaskan oleh variabel di luar model. Demikian juga dengan variabel pembangunan pariwisata berkelanjutan dengan nilai *R Square* sebesar 0,469 mengandung arti bahwa 46,9 persen variabilitasnya dijelaskan oleh variabel peran pemerintah, peran swasta, modal sosial, dan partisipasi masyarakat, sedangkan 53,1 persen dijelaskan oleh variabel di luar model. Nilai *R-square* seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1 bernilai 0,467 dan 0,469 yang berarti moderat.

Nilai Q^2 pengujian model struktural dilakukan dengan melihat nilai Q^2 (*predictive relevance*). Untuk menghitung Q^2 dapat digunakan rumus:

$$Q^2 = 1 - (1 - R_1^2)(1 - R_2^2)$$

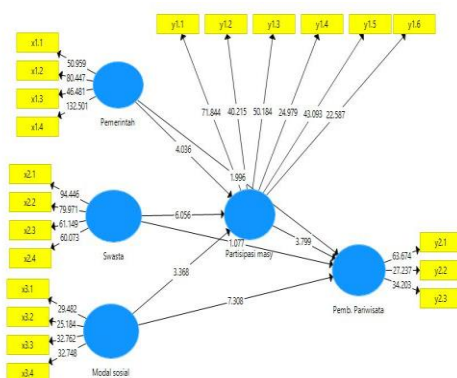
$$Q^2 = 1 - (1 - 0,467)(1 - 0,469)$$

$$Q^2 = 0,717$$

Hasil perhitungan Q^2 menunjukkan bahwa nilai Q^2 0,717. Menurut Ghazali (2014), nilai Q^2 dapat digunakan untuk mengukur seberapa baik nilai observasi yang dihasilkan oleh model dan estimasi parameternya. Nilai $Q^2 > 0$ (nol) menunjukkan bahwa model model dikatakan sudah cukup baik, sedangkan nilai $Q^2 < 0$ (nol) menunjukkan bahwa model kurang memiliki nilai yang relevansi prediktif. Dalam model penelitian ini konstruk atau variabel laten endogen memiliki nilai $Q^2 > 0$ (nol) sehingga prediksi yang dilakukan oleh model dinilai sudah relevan.

Pengujian Pengaruh langsung

Pengujian hipotesis tentang pengaruh variabel peran pemerintah, peran swasta, modal sosial terhadap partisipasi masyarakat dan pembangunan pariwisata berkelanjutan disajikan pada Gambar 1



Gambar 2. Nilai t Statistik Model Analisis Jalur

Sumber: Data diolah, 2019

Pengujian terhadap hipotesis dalam metode PLS dilakukan dengan menggunakan simulasi terhadap setiap hubungan yang dihipotesiskan, dalam hal ini dilakukan metode *bootstrap* terhadap sampel. Metode *bootstrap* juga berfungsi untuk meminimalkan masalah ketidaknormalan data penelitian yang digunakan. Pada penelitian ini telah ditentukan sebelumnya nilai T-tabel dengan signifikansi 5%, adalah sebesar 1,96. Semua koefisien jalur pada Tabel 5.22 memiliki nilai t statistik di atas 1,96 kecuali pengaruh Peran swasta terhadap Pembangunan pariwisata berkelanjutan dengan t statistik 0,282.

Analisis *Strength, Weaknesses, Opportunities, dan Treats* (SWOT)

Selain melakukan pengambilan data dengan kuisioner guna mendapatkan data yang akurat di lokasi penelitian, dilakukan juga analisis SWOT, guna menganalisis kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kota Kupang.

Peran pemerintah yang positif dan signifikan dalam pembangunan pariwisata berbasis masyarakat, dominan direfleksikan oleh indikator motivator yaitu menyediakan membentuk kelompok sadar wisata, menjembatani kepentingan publik dan swasta, serta menjembatani kebutuhan masyarakat dengan instansi terkait. Kehadiran pemerintah dapat dinyatakan dapat mendorong percepatan terwujudnya pembangunan pariwisata berbasis masyarakat di Kota Kupang. Peran pemerintah Kota Kupang dalam mendorong partisipasi masyarakat di destinasi masih rendah. Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat di Kota Kupang, harus lebih dioptimalkan oleh pemerintah, sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat di destinasi wisata (Jelamu, 2017).

Suasapa (2016) mengungkapkan bahwa, implementasi konsep pariwisata berbasis masyarakat di Pantai Kedongan, menunjukkan dukungan pemerintah daerah merupakan salah satu faktor pendukung dalam implementasi pariwisata berbasis masyarakat. Keikutsertaan peran pemerintah yang begitu berarti, dalam pembangunan pariwisata berbasis masyarakat, ditentukan oleh berbagai faktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan peran pemerintah dalam pembangunan pariwisata berbasis masyarakat, positif dan signifikan yaitu kepercayaan, kepastian, politik anggaran, jaminan. CBT merupakan sebuah bentuk alternatif pariwisata yang dikembangkan dengan melibatkan secara langsung masyarakat yang berada di destinasi wisata (Saarinen, 2006). Konsep pengembangan pariwisata berbasis

masyarakat merupakan sebuah respon dari berbagai dampak negatif perkembangan sektor pariwisata yang dikembangkan secara massal sebagaimana yang berkembang dalam dekade terakhir. Menurut Andereck et al, (2005) dampak negatif ini khususnya yang dirasakan oleh warga lokal. CBT bertujuan untuk melibatkan warga lokal dalam pengembangan pariwisata dalam skala kecil, dimana hal ini merupakan bagian dari pengentasan kemiskinan (Ernawaty, 2018). CBT telah diakui sebagai sebuah katalisator pengembangan sosial ekonomi (Hall and Jenkins, 1998). Banyak Negara mengadopsi CBT dalam pengembangan sektor pariwisata, khususnya pada Negara sedang berkembang (Davis & Morais, 2004).

Pengaruh Peran Swasta Terhadap Partisipasi Masyarakat di Kota Kupang

Peran swasta dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata. Hal ini ditunjukkan dalam analisis data penelitian yang menunjukkan bahwa, swasta memberikan pengaruh positif, terhadap partisipasi masyarakat di Kota Kupang, yang menunjukkan bahwa, jika semakin baik peran swasta, maka akan meningkatkan partisipasi masyarakat. Peran sektor swasta terhadap partisipasi masyarakat di Kota Kupang, masih jauh dari harapan masyarakat, karena swasta yang melakukan usaha pariwisata di Kota Kupang, belum berkontribusi nyata melalui perekrutan tenaga kerja lokal, maupun dalam pemberian CSA, kepada masyarakat lokal, di sekitar perusahaan. Kerjasama antara pihak swasta dengan masyarakat, dilakukan dengan berbagai kegiatan kepariwisataan seperti mengadakan atraksi wisata dan pameran sektor usaha kecil dan mikro (UKM), yang bertujuan mendukung industri kepariwisataan. Swasta harus bekerjasama lebih intensif dengan masyarakat di destinasi wisata, dalam pengembangan SDM, guna pengembangan dan pengelolaan obyek wisata, sehingga masyarakat dapat terlibat dalam proses kegiatan pariwisata (Samsudin, 2005).

Membangun kemitraan dengan semua pelaku usaha pariwisata dan mendorong kerja sama yang saling menguntungkan dalam pengembangan kepariwisataan, tidak terlepas dari tanggung jawab para pelaku industri kepariwisataan yaitu sektor swasta. Strategi kemitraan dengan swasta dalam penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik, bermanfaat dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kota Kupang NTT (Wardana, 2017). Menurut Latu (2017), membangun sumber daya manusia di bidang pariwisata merupakan aset penting dalam pengembangan pembangunan di Kota Kupang. Pengembangan sumber daya manusia di

destinasi wisata merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia guna mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformative. Swasta berperan meningkatkan partisipasi masyarakat di sekitar destinasi wisata dengan penyuluhan, pelatihan keterampilan, serta penguatan kelembagaan pariwisata melalui program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri di destinasi wisata (Wardana, 2017).

Pengaruh Modal Sosial terhadap Partisipasi Masyarakat di Kota Kupang

Modal sosial bersifat kumulatif dan bertambah dengan sendirinya (Putnam, 1993). Oleh karena itu modal sosial tidak akan habis jika digunakan, melainkan dapat semakin meningkat. Berkurangnya modal sosial disebabkan karena modal sosial tersebut tidak dipergunakan (Rasmen, 2017). Sejalan dengan konsep diatas berdasarkan hasil penelitian dan analisis data menunjukkan bahwa modal sosial memiliki indikator kepercayaan, jaringan, dan norma, berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasbulah (2006) yang mengatakan bahwa modal sosial sebagai investasi dalam rangka mendapatkan sumber daya yang baru. Menurut fakuyama (2005) menyatakan bahwa dengan bersandar pada norma dan nilai-nilai bersama asosiasi antar manusia akan menghasilkan kepercayaan yang akhirnya memiliki nilai ekonomis yang besar dan terukur. Putnam (1993) memberikan pernyataan yang menguatkan bahwa modal sosial yang baik akan melahirkan kehidupan masyarakat yang harmonis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan modal sosial dalam pembangunan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terlihat yaitu kepercayaan, jaringan, dan norma. Modal Sosial yaitu dimensi jaringan, kepercayaan dan norma berpengaruh dalam menciptakan lapangan kerja (Jambika, 2011). Peran modal sosial terhadap partisipasi masyarakat dalam rangka berkaitan dengan *job search* dan *job opportunity* belum terwujud secara optimal (Indraputra, 2017). Modal Sosial juga dikaitkan dengan nilai-nilai seperti toleransi, solidaritas, atau kepercayaan. (Siegler, 2014; Westlund, 2006; Lin, 2001 Michaelides et al, 2013). Empat fitur utama sebagai indikator modal sosial adalah hubungan kepercayaan aturan dan norma umum serta keterbukaan dalam jaringan masyarakat dan kelompok lokal (Pretty and Ward 2001 Pretty 2003;

Perreault 2003; Berggren dan Jordahl 2006; Coleman 1988; Grootaert dan Narayan 2004; Woolcock dan Narayan 2000; Dasgupta).

Hasil penelitian bahwa modal sosial berpengaruh pada partisipasi masyarakat di Kota Kupang. Dengan adanya modal sosial dapat mengatur kehidupan antar masyarakat, agar sesuai dengan norma yang berlaku. Perpaduan pengetahuan (modal manusia) dan kerjasama (modal sosial) memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial budaya serta lingkungan disekitar destinasi wisata. Modal sosial sangat dibutuhkan dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, mengingat Kota Kupang memiliki keunikan dengan daerah lain di Indonesia karena didiami berbagai suku di NTT yang berbeda bahasa, pakaian adat, budaya, adat istiadat. Hal dapat dikembangkan menjadi wisata budaya, dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengaruh Peran Pemerintah Terhadap Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

Peran pemerintah adalah sebagai motivator, inisiator, pemerkasa, dan dinamisator. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa peran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan pariwisata berkelanjutan. Peran pemerintah sangat dominan dalam terwujudnya pariwisata berkelanjutan di Kota Kupang. Pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah pembangunan yang memperhatikan keberlanjutan ekosistem, mempertahankan keunikan, kearifan lokal, masyarakat sebagai obyek dan subyek pembangunan.

North (1990) menyatakan bahwa pengembangan daya saing dunia usaha memerlukan kelembagaan pemerintah dalam menciptakan *frame work* yang memungkinkan aset produktif berkembang untuk mendapatkan pangsa pasar yang semakin bersaing dan suatu pertimbangan pemerintah agar sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan pada waktu yang akan datang untuk tujuan ekonomi, sosial dan budaya yang dapat di jadikan daya tarik untuk memelihara integritas keanekaragaman budaya yang menunjang sistem kehidupan (Yoeti, 2008).

Berdasarkan Undang-Undang pasal 10 Tahun 2009 menyatakan bahwa pemerintah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Selanjutnya dalam pasal 14, pembinaan kepariwisataan diarahkan untuk mewujudkan dan memelihara kelestarian serta keutuhan obyek dan daya tarik wisata. Berdasarkan

hasil penelitian, pemerintah berperan terhadap pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kota Kupang. Hal ini sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) yang telah dicanangkan di level provinsi yang dijadikan sebagai peraturan daerah di NTT sejak Tahun 2014-2019, tentang pengembangan pariwisata di Kota Kupang.

Pengaruh Peran Swasta Terhadap Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

Agar pembangunan pariwisata di Kota Kupang dapat berkelanjutan, dibutuhkan keterlibatan pihak swasta dalam membangun *akseibilitas* disemua destinasi wisata. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari peran swasta terhadap pembangunan pariwisata yang berkelanjutan di Kota Kupang.

Rendahnya peran swasta dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: Kurang tenaga kerja yang berkompeten di bidang pariwisata, sehingga swasta menggunakan tenaga kerja yang berasal dari luar Kota Kupang (Sastra, 2018). Pemerintah Kota Kupang, belum menerapkan peraturan daerah yang mengatur pihak swasta dalam berkolaborasi dengan masyarakat disekitar destinasi wisata. Pemerintah Kota Kupang tidak memiliki regulasi, dalam mengatur kolaborasi antara Swasta dan masyarakat di destinasi wisata, sehingga pihak swasta di Kota Kupang, hanya bersifat mencari keuntungan dalam investasi, dan tidak mengedepankan kebutuhan masyarakat lokal disekitar destinasi wisata

Peran dan kewenangan swasta (Investor, Perguruan Tinggi, LSM, pelaku pariwisata lainnya) yaitu untuk, melakukan promosi objek wisata dan menggerakkan kunjungan wisatawan antar objek wisata (Setiawina,dkk 2018). Keterlibatan swasta dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan merupakan suatu kewajiban, karena swasta merupakan mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan pariwisata dibidang pembangunan *akseibilitas*, dan sebagai pelaksana atau inyektor (Wearing dalam Heny, 2013). Pemerintah Kota Kupang, harus mengeluarkan peraturan daerah, yang mewajibkan swasta berkontribusi nyata melalui penyaluran CSA. Berdasarkan hasil FGD yang dilakukan peneliti, terbukti pihak swasta yang bergerak dibidang pariwisata tidak pernah melakukan penyaluran CSA kepada masyarakat disekitar perusahaan (Timex, 2018). Langkah konkrit peran swasta adalah dengan menyisihkan

CSA untuk melakukan penanaman tanaman bakau di hutan mangroef, maupun bekerjasama dengan instansi terkait dan perguruan tinggi, untuk mengadakan penyuluhan tentang pelestarian wisata, sehingga menunjang pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kota Kupang (Manuk, 2018).

Pengaruh Modal Sosial Terhadap Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap pembangunan pariwisata berkelanjutan. Modal sosial merupakan factor utama dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan. Hal ini mengindikasikan bahwa modal sosial memiliki pengaruh terhadap pembangunan pariwisata berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan hasil studi Marriton et al. (2010) yang menyebutkan bahwa dalam pariwisata berkelanjutan, modal sosial mempengaruhi pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, modal sosial memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan pariwisata berkelanjutan yaitu, semakin tinggi modal sosial, maka pembangunan pariwisata berkelanjutan akan semakin baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil Hasbullah (2006) yang menyatakan modal sosial sebagai investasi dalam rangka mendapatkan sumber daya yang baru. Fukuyama (1995) menyatakan bahwa, dengan bersandar pada norma- norma dan nilai-nilai bersama, asosiasi antar manusia tersebut akan menghasilkan kepercayaan yang akhirnya memiliki nilai ekonomis yang besar dan terukur. Putnam (1993), memberi pernyataan yang menguatkan bahwa modal sosial yang baik akan melahirkan kehidupan masyarakat yang harmonis. Bila disandingkan dengan modal finansial dan modal manusia, keberadaan modal sosial memiliki perbedaan yang cukup berarti. Modal sosial bersifat kumulatif dan bertambah dengan sendirinya (Putnam, 1993).

Penelitian Mattaritta et al. (2010) menyebutkan bahwa, dalam pariwisata berkelanjutan yang berbasis masyarakat atau pariwisata sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, harus mempertimbangkan modal sosial. Faktor kunci yang ditemukan adalah, interaksi antara lembaga masyarakat. Modal sosial menciptakan hubungan intra dan ekstra komunitas yang kuat, komunikasi terbuka, partisipasi, keadilan distributif dan toleransi. Modal sosial merupakan pijakan dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan, agar norma

yang berada dalam masyarakat, tidak tergeser karena kemajuan pembangunan pariwisata (Parwata, 2014).

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pariwisata Berkelanjutan

Peningkatan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan dan merupakan cerminan bahwa dalam pembangunan masyarakat lebih memberikan fokus pada aspek manusia dan masyarakat bukan semata-mata pada aspek fisik (Sutami, 2009). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dan analisis data yang menyatakan bahwa, partisipasi masyarakat memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan pariwisata berkelanjutan. Ini berarti, partisipasi masyarakat yang tinggi akan menunjang pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kota Kupang. Wearing dalam Heny (2013) mengatakan bahwa masyarakat berperan penting dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan karena sumberdaya dan keunikan tradisi merupakan penerak utama pariwisata.

Strategi pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan dengan cara *sharing* informasi, merumuskan tujuan, menetapkan kebijakan, mengalokasikan sumber pendanaan, mengopertasikan program serta mendistribusikan manfaat yang diperoleh. Masyarakat dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga implementasi pemerataan hasil-hasil pembangunan pariwisata, agar pembangunan pariwisata, dapat dirasakan manfaatnya, oleh seluruh masyarakat (Wardana, 2017).

Partisipasi masyarakat terhadap pariwisata berkelanjutan mengacu pada usaha-usaha lokal yang bertujuan untuk perencanaan, pengembangan dan pengolahan yang berkaitan dengan peluang pariwisata (Murphy, 1983) berdampak pada pemberian kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat dalam manajemen serta pembangunan pariwisata yang memberikan dampak ekonomi pada saat ini, dan masa yang akan datang (Hausler dan Garrot, 2001). Partisipasi masyarakat terhadap pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kota Kupang oleh pemerintah, yang dilaksanakan oleh swasta, tidak menjawab kebutuhan masyarakat di sekitar destinasi wisata.

Pengaruh Peran Pemerintah, Peran Swasta dan Modal Sosial terhadap Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Melalui Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan penelitian dan hasil analisis data, menyatakan bahwa partisipasi masyarakat secara signifikan memediasi pengaruh peran pemerintah, peran swasta dan modal sosial terhadap pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kota Kupang. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan yaitu dengan menyediakan *aktraksi* sebagai produk wisata, pengolahan lahan pertanian secara tradisional, upacara adat, kerajinan tangan yang dapat memberikan daya tarik bagi wisatawan.

Kerjasama dan kemitraan yang tepat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, untuk saling mendukung, agar terciptanya pembangunan pariwisata yang berkelanjutan (Heny, 2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, variabel partisipasi masyarakat, memoderasi peran pemerintah, peran swasta dan modal sosial terhadap pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kota Kupang. Modal sosial dalam penelitian berfungsi sebagai penguat partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan. Modal sosial juga berpengaruh secara signifikan terhadap pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kota Kupang.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Suasapha (2006) tentang implementasi konsep pariwisata berbasis masyarakat di Pantai Kedongan, menunjukkan bahwa modal sosial yang dimiliki adalah salah satu faktor pendukung adalah aspirasi warga Desa Adat Kedongan. Secara kolektif diistilahkan sebagai "*sense of community*", yaitu kualitas hubungan antar manusia yang mengakibatkan mereka dapat hidup bersama secara sehat dan berkelanjutan yang mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata (Arief, 2011).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Hal yang dapat disimpulkan adalah peran pemerintah Kota Kupang Nusa Tenggara Timur menunjukkan pengaruh yang positif terhadap partisipasi masyarakat. Hal ini berarti semakin baik peran pemerintah maka partisipasi masyarakat akan semakin tinggi. Peran swasta di Kota Kupang menunjukkan menunjukkan pengaruh yang positif terhadap partisipasi masyarakat. Hal ini berarti, semakin baik peran swasta, maka semakin tinggi partisipasi masyarakat. Modal sosial terhadap

partisipasi masyarakat. Peran pemerintah terhadap pembangunan pariwisata berkelanjutan, semakin tinggi peran pemerintah maka peran pembangunan pariwisata berkelanjutan akan semakin baik. Peran swasta terhadap pembangunan pariwisata berkelanjutan tidak signifikan, hal ini berarti kurangnya peran sektor swasta dalam bermitra dengan pemerintah maupun masyarakat terhadap pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kota Kupang. Modal sosial terhadap pembangunan pariwisata berkelanjutan, semakin tinggi modal sosial maka pembangunan pariwisata berkelanjutan juga akan semakin baik. Partisipasi masyarakat terhadap pariwisata berkelanjutan, semakin tinggi partisipasi masyarakat akan menunjang peningkatan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kota Kupang. Dengan dimediasi oleh partisipasi masyarakat maka variabel peran pemerintah, peran swasta dan modal sosial dapat dikatakan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sangat mendorong swasta dan pemerintah serta modal sosial dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian maka disarankan yaitu partisipasi masyarakat merupakan dasar dalam pengembangan destinasi wisata di Kota Kupang. Jika pemerintah mengembangkan pariwisata di Kota Kupang, maka harus bermitra dengan masyarakat melalui peran sosial, peran budaya, peran ekonomi, kepercayaan, jaringan dan norma yang merupakan penopang daya tarik wisata di Kota Kupang yang diwujudkan dalam *Sapta Pesona*. Peran swasta harus lebih dioptimalkan dalam mempromosikan pariwisata di Kota Kupang melalui media cetak atau elektronik dan menyelenggarakan *even* pariwisata. Pihak swasta bermitra dengan masyarakat disekitar destinasi wisata dalam membangun *aksebilitas* serta melakukan kerjasama dengan pemerintah dan *stakeholder* terkait, dalam bidang pengembangan SDM. Pariwisata yang dikembangkan di Kota Kupang harus tetap menjaga modal sosial berupa nilai-nilai budaya, adat istiadat dan norma yang berlaku dalam masyarakat agar budaya lokal tidak dirusak atau dirgerser, akibat pembangunan pariwisata. Budaya dan adat istiadat, yang majemuk harus dikembangkan, menjadi daya tarik wisata. Partisipasi masyarakat lokal terhadap pembangunan pariwisata berkelanjutan harus lebih ditingkatkan dengan penguatan organisasi dibidang kepariwisataan, seperti membentuk kelompok kuliner dan cinderamata yang merupakan sumber pencaharian utama masyarakat Kota Kupang.

Sanggar seni juga harus dikembangkan oleh pemerintah, agar masyarakat tetap menjaga budaya serta adat istiadat dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Peran swasta harus lebih ditingkatkan, dipertegas dengan PERDA, yang mengatur peran sektor swasta dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kota Kupang.

DAFTAR REFERENSI

- Berger. L., 1992, Hotel Crime: Are You as Safe as You Think? *Corporate Travel*. November. 26-29.
- BPS Kota Kupang, 2017, *Berita Resmi Statistik*, BPS Kota Kupang 2017.
- Elfianita. E., 2006, Pembangunan Pariwisata Berbasis Community Based Tourism (CBT) di Desa Wisata Limbasari Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga. *Jurnal*, UNY.
- Hair et al. 2010. Multivariate data analysis. Upper Saddle River. NJ: Pearson Prentice Hall.
- Kleden Marianus. 2018 Membangun NTT melalui Sektor Pariwisata, *Jurnal BAPEDA NTT*.
- Maromon Y Rifat, 2017, Analisis Obyek Wisata Dan Arah Pengembangannya di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur (*Tesis*).
- Murphy, P.E., 1983, Tourism as Community Industry. *Tourism Management*. Vol. 4. 180-193.
- Nyoman Djinar Setiawina, 2018 Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi pembangunan pariwisata di Nusa Panida (penelitian).
- Parwata, I Putu, 2004, Peran Pemerintah Terhadap Modal Sosial Dalam Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat dan Berkelanjutan di Badung Utara (*Disertasi*).
- Pemerintah Provinsi NTT 2015, Peraturan Daerah Provinsi NTT No 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi NTT Tahun 2015–2025. Kota Kupang Pemprov NTT.
- Subhan Purwadinata, Agus Suman, Susilo, Asfi Manzilati, 2019. Uncovering Principal-Agent Behavior in the Village Fund Management Technique. <http://www.jardcs.org/abstract.php?id=2193>
- Suyana Made, 2006, Pengaruh Perkembangan Pariwisata Terhadap Perekonomian dan perubahan Struktur Ekonomi Serta Kesejahteraan Masyarakat di Propinsi Bali (*Disertasi*) Universitas Airlangga, Surabaya
- Wardana Eka Narinda, 2017 Membangun Pariwisata NTT sebagai kekuatan ekonomi daerah.